

Judul : Anomali pembelian BBM bersubsidi, DPR minta pemerintah percepat sistem pengawasan berbasis AI
Tanggal : Minggu, 19 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anomali Pembelian BBM Bersubsidi

DPR Minta Pemerintah Percepat Sistem Pengawasan Berbasis AI

SENAYAN meminta Pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Pasalnya, berbagai modus baru penyalahgunaan energi subsidi terus berkembang.

Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita mengatakan, persoalan penyelewengan BBM bersubsidi ini bukan kasus baru. Kejadian itu selalu berulang dari tahun ke tahun. Mitigasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi kebocoran distribusi BBM di lapangan.

Karena itu, sistem pengawasan yang diterapkan Pemerintah saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dan mendalam. Pemerintah harus memastikan sistem pemantauan bisa mengikuti pola pelanggaran yang dinamis. "Ada anggapan para pelaku ilegal selalu lebih pintar daripada sistem pengawasan resmi," ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Ratna menjelaskan, para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi terus mencari celah baru memanfaatkan celah komoditas itu. Aparat dan instansi pengawasan dituntut mening-

katkan kemampuan deteksi agar tidak tertinggal. Pasalnya, para pelaku penyalahgunaan tampak lebih inovatif dibanding petugas.

Salah satu langkah mitigasi yang harus dilakukan Pemerintah adalah mempercepat sistem pengawasan berbasis Kecerdasan Artifisial (AI). Penerapan teknologi digital itu diharapkan bisa memperkuat pemantauan sehingga lebih ketat. "Langkah ini juga ditujukan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi meluas," ingatnya.

Dia menyortir peta jalan infrastruktur teknologi informasi BPH Migas yang terkesan lambat. Di mana, target implementasi sistem nasional berbasis AI baru akan rampung pada 2028. Padahal, penyelewengan distribusi BBM subsidi merupakan persoalan darurat yang membutuhkan penanganan yang lebih cepat.

Ratna mempertanyakan alasan implementasi teknologi modern itu baru dijadwalkan pada fase ketiga pengembangan. Padahal, percepatan sistem pengawasan mendesak agar penyelewengan distribusi bisa dicegah sejak dini. "Karena pola penyalahgunaan yang terjadi saat ini sudah sangat



Ratna Juwita

masif," ujarnya.

Dia menduga, hambatan utama percepatan implementasi sistem canggih itu berada pada aspek pembiayaan. Jika demikian, pihaknya menyatakan sangat terbuka membantu mencari jalan keluar terbaik. Dukungan anggaran siap diperjuangkan jika Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengalami kesulitan.

Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menambahkan, pihaknya terus menerima laporan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Modus yang digunakan

para pelaku adalah menimbun komoditas itu. Mereka kemudian menjual kembali BBM bersubsidi kepada sektor industri atau bidang komersial lainnya.

Dia bilang, berdasarkan temuan kasus itu, BPH Migas beserta seluruh jajaran terus mengoptimalkan pengawasan lapangan. BPH Migas juga telah melakukan berbagai langkah kontrol ketat hingga operasi tangkap tangan. Penindakan hukum tersebut dilaksanakan dengan melibatkan aparat penegak hukum secara terpadu.

Sebagai langkah lanjut, Komisi XII meminta pendistribusian BBM kepada masyarakat lebih dioptimalkan. Langkah itu mendesak dilakukan agar antrean panjang di SPBU terurai. "Pengelola SPBU disarankan menambah jam operasional serta memperbanyak armada transportasi pengangkut," ucapnya.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengakui adanya anomali penggunaan Quick Response (QR) code pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya, ada satu kendaraan yang melakukan transaksi berulang dalam sehari. Modus penyimpangan itu

dilakukan memanfaatkan kode unik berbeda yang didapatkan secara tidak sah oleh pelaku.

Contoh kasusnya, satu mobil berpelat nomor tertentu tercatat bertransaksi hingga 2.560 kali dalam sebulan. Kendaraan itu menggunakan QR code berbeda sebanyak satu sampai tiga kali setiap hari. "Penyimpangan ini menjadi catatan serius bagi BPH Migas," ucapnya.

Atas temuan itu, pihaknya bergerak cepat dengan memblokir sekitar 307.107 QR code terindikasi bermasalah. Jumlah penindakan digital itu masih bisa terus bertambah ke depannya. Penambahan itu berjalan seiring dengan investigasi terhadap temuan kode ilegal yang dibuat dengan melawan hukum.

Dia menambahkan, pengembangan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi oleh BPH Migas akan dilakukan bertahap. Fase pertama pada 2026 fokus membangun Enterprise Data Warehouse wilayah Jawa, Madura, dan Bali. "Fase kedua perluasan integrasi data, lalu fase ketiga pada 2028 berupa implementasi menyeluruh sistem berbasis AI," tutupnya. ■ PVB